

**PERAN VARIABEL MODERASI KOMPETENSI APARATUR TERHADAP
PENGARUH ANTARA KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Susanti ¹⁾
Aris Eddy Sarwono ²⁾
Sunarti ³⁾**

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

e-mail: ¹⁾ susanti25061999@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to determine the role of the moderating variable of apparatus competence on the influence between clarity of budget targets and accountability of local government performance. The research uses primary data from Koesioner answers that are distributed to government apparatus in Wonogiri District OPD. Sampling techniques using the purposive sampling method.

The result of T count 6.927 with a P-value of $0.000 < 0.05$ then H_0 rejected means there is a significant influence on the clarity of the target budget (X1) to the performance accountability of the local government (Y). Results F Count of 47.978 with a P-value of $0.000 < 0.05$ then this model is precise. The results of the R2 test obtained the Adjusted R square value of 0.317 means it can be known that the influence given by the free variables is the target of the budget targets (X1) to the bound variables that is the performance accountability of the local government (Y) has a real impact of 31% while the rest ($100\% - 32\%$) = 68% are influenced by other factors outside. The moderation variable regression test results show P – value (significance) for a moderation variable of $0.022 < 0.05$, so H_0 is rejected, meaning that apparatus competency variable (X2) significantly moderated the influence of the target clarity of budget (X1) towards the local government's performance accountability (Y).

Keywords: Clarity Of Budget Targets, Apparatus competence, Accountability Of Local Government Performance

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pemerintah mencerminkan komitmen pemerintah dalam melakukan pelayanan publik, hal ini dapat meningkatkan “kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi pada publik yang dilakukan oleh pemerintah” (Nordriawan dan Hertianti, 2010). Asas akuntabilitas merupakan salah satu asas umum pemerintahan negara yang baik (*good governance*). Sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan menjalankan suatu (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014). Untuk itu Sekretariat Kabinet menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai wujud akuntabilitas kinerja? dengan memuat pertanggungjawaban (keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah diamanatkan *stakeholders* guna mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.)

Berdasarkan informasi dari *Solopos.com* disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Wonogiri pada tahun “2018 mendapat nilai 70,43 atau masuk kategori sangat baik (BB). Nilai itu meningkat signifikan dibanding tahun 2017 yang hanya 61,91 atau kategori baik (B)”. Wonogiri menjadi satu dari empat kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memperoleh nilai BB. Tiga daerah lainnya yakni Banyumas dengan nilai 70,95, Pekalongan 70,88, dan Cilacap 70,61. Dalam penilaian ini, Wonogiri mengungguli Solo yang mendapat 66,70 dan Semarang 67,92 di kategori Ba. Hal ini merupakan pencapaian luar biasa yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri.

(Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak dapat lepas dari anggaran pemerintah daerah). Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran adalah salah satu karakteristik anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran!. kPada koteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparatur, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. “Adanya sasaran anggaran yang jelas, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah (Darwanis dan Chairunnisa, 2013)”.

(Faktor lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yaitu kompetensi aparatur pemerintah). Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan juga berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam melaksanakan pekerjaannya (Sutrisno, 2009). Makna kompetensi adalah kepribadian yang melekat pada diri seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kompetensi aparatur pemerintah termasuk elemen penting dalam terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Standar kompetensi merupakan spesifikasi atau sesuatu yang ditetapkan, berisi persyaratan minimal yang harus dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu agar mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang baik.

Dalam penelitian Fitriana, Hidayati, dan Mawardi (2018) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri, Agusti, dan Paulus (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut penelitian Widhantisa dan Kadir (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Putri, Agusti, dan Paulus (2017) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian

karena adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah maka peneliti menambahkan variabel moderasi kompetensi aparatur pemerintah yang digunakan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah di kabupaten Wonogiri pada tahun 2018. 2) Menganalisis kompetensi aparatur memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah di kabupaten wonogiri pada tahun 2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menyatakan bahwa hubungan antara dua pihak yang terikat dalam perjanjian dan terdiri dari agen yaitu pihak yang diberi tanggung jawab serta pihak prinsipal yang memberikan tanggung jawab. hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dan pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. (Hery dalam Cefrida 2014)

Kaitan antara penelitian ini, dengan teori keagenan adalah dimana pemerintah mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat, atau pemerintah berkewajiban sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat atau pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. (Mardiasmo, 2009). Sedangkan definisi lain menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta. (Bastian, 2010)

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksana kegiatannya. (Ulum, 2004) sedangkan definisi lain

mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2009)

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari tujuan, misi dan visi instansi pemerintah yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. (SK Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003)

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003). Prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 2) Harus merupakan suatu *system* yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 6) Harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian dan tujuan yang telah ditetapkan.

ANGGARAN

Budgeting is the process of allocating scarce resources to unlimited demands, and a budget is a dollar-and-cents plan of operation for a specific period of time. (Freeman dan Shoulders, 2003) dapat dikatakan bahwa penganggaran adalah suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas (*unlimited demands*). Sementara itu, anggaran adalah rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang. Anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. (Mardiasmo, 2009)

KEJELASAN SASARAN ANGGARAN

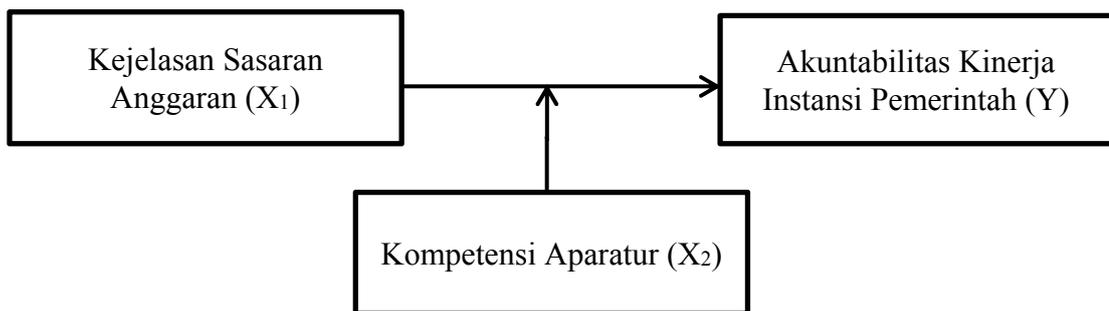
Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. (Suhartono dan Solichin, 2006)

KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH

Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan juga berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam melaksanakan pekerjaannya (Sutrisno, 2009). Makna kompetensi adalah kepribadian yang melekat pada diri seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Kompetensi merupakan persyaratan dan pertimbangan penting dalam penatan pegawai negeri sipil (PNS). Manajemen sumber daya aparatur negara harus berbasis kompetensi antara lain: rekrutmen, seleksi, pengangkatan, pelatihan, penempatan dan pengembangan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan, dijelaskan bahwa dalam rangka menjamin obyektifitas, keadilan, dan transparansi, pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan dan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan ini merupakan persyaratan kompetensi jabatan manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan, yang meliputi 10 Standar kompetensi : 1) Perencanaan dan Pengorganisasian (PP). 2) Berpikir Analisis (BA). 3) Berpikir Konseptual (BK). 4) Berorientasi pada Hasil (BpH). 5) Komunikasi (Kom). 6) Membangun Hubungan Kerja (MHK). 7) Pembelajaran Berkelanjutan (PB). 8) Pencarian Informasi (PI). 9) Pengaturan Kerja (PkJ). 10) Perbaikan Terus-menerus (PTM).

Model dan Hipotesis Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan model diatas maka hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

H2: Kompetensi Aparatur dapat memoderasi Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner pada aparatur yang tergabung dalam OPD Kabupaten Wonogiri.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu berupa angka-angka atau bilangan. Sumber data merupakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di kantor perangkat daerah Wonogiri yang berjumlah 53 kantor pemerintah daerah. Jenis perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan (Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016). Kemudian data sekunder berupa penjelasan mengenai fenomena yang diberitakan sebuah website Solopos.com mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Wonogiri yang mengalami peningkatan.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada 53 kantor OPD di kabupaten Wonogiri.

Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2013) Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Non-Probability Sampling berdasarkan Purposive Sampling dengan mengambil responden Kepala pimpinan/dinas OPD, dan Bagian Keuangan di OPD Kabupaten Wonogiri. Dari 53 OPD masing-masing diambil 2 responden sehingga responden dalam penelitian ini berjumlah 106.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan meliputi pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi, uji t, uji F, koefisien determinasi (R^2), uji regresi variabel moderasi (uji nilai selisish mutlak).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) dengan 5 butir pertanyaan, kompetensi aparatur (X_2) dengan 10 butir pertanyaan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Y) dengan 7 butir pertanyaan menunjukkan semua butir pertanyaan valid, ditunjukkan dengan $p(0,000) < 0,05$.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas semua item kuesioner mengenai kuesioner kejelasan sasaran anggaran (X_1), kompetensi aparatur (X_2), terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Y) yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel (handal) karena *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,542 *p-value* $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai tolerence 1,000 $> 0,1$ dan VIF 1,000 < 10 . Karena signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas.

Analisis Regresi

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu kejelasan sasaran anggaran (X_1), terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Y).

Variabel	<i>Coefficient</i>	<i>t-test</i>	<i>Sig.</i>
<i>Constant</i>	15,015	6,570	0,000
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,718	6,927	0,000
R^2	0,324		
<i>Adj. R²</i>	0,317		
<i>F-test</i>	47,978		0,000

Sumber: Data Primer diolah, 2020

$$Y = 15,015 + 0,718 X_1 + e$$

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

Pengujian signifikansi pengaruh kejelasan sasaran anggaran (X_1) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Y):

Hasil analisis diperoleh dari nilai t hitung sebesar 6,927 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan.

Uji F

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ketepatan model pengaruh variabel bebas kejelasan sasaran anggaran (X_1) terhadap variabel akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Y).

Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 47,978 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka model ini tepat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk menguji seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen sedangkan sisanya tidak dapat dijelaskan merupakan bagian variasi dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Hasil analisis uji R^2 diperoleh nilai *Ajusted R square* sebesar 0,317 berarti dapat diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu kejelasan sasaran anggaran (X_1) terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Y) mempunyai pengaruh yang nyata sebesar 31% sedangkan sisanya ($100\% - 32\%$) = 68% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Uji Regresi Variabel Moderasi

Variabel *Moderating* adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen.

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	30.352	.251		120.895	.000
Zscore: Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1)	.923	.187	.453	4.943	.000
Zscore: Kompetensi Aparatur (X_2)	.427	.188	.209	2.270	.025
ABSZx1 Zx2	.599	.258	.184	2.326	.022

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan *p-value* (signifikansi) untuk variabel moderasi sebesar $0,022 < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya bahwa variabel Kompetensi Aparatur (X_2) signifikan memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

Pembahasan

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 6,927 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas kejelasan sasaran anggaran (X_1) dengan variabel terikat

yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Y). Hipotesis 1 terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Wonogiri. Hal ini berarti bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Oleh karena itu kejelasan sasaran anggaran yang baik sangat diperlukan untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.. Apabila kejelasan sasaran anggaran buruk maka dapat mengakibatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dinilai buruk, karena kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparatur, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah artinya, aparatur pemerintah sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai (*agent*) kepada masyarakat sebagai (*principal*) dengan baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Putri, dkk, 2017), kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Darman, dan Baharuddin, 2015), dan (Fitrawati, dkk, 2017).

2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Memoderasi Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil analisis diperoleh p -value (signifikansi) untuk variabel moderasi sebesar $0,022 < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya bahwa variabel Kompetensi Aparatur (X_2) signifikan memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Hipotesis 2 terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dalam memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil yang signifikan memperkuat, hal ini berarti bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran yang dihasilkan yang didukung oleh kompetensi yang dimiliki oleh aparatur OPD Kabupaten Wonogiri, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja pemerintah yang dicapai. Kompetensi berperan penting dalam kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah karena kompetensi merupakan spesifikasi atau sesuatu yang ditetapkan, berisi persyaratan minimal yang harus dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu agar mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang baik. Kompetensi aparatur signifikan memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah artinya, aparatur pemerintah sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai (*agent*) kepada masyarakat sebagai (*principal*) dengan baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2017) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, dan Abdallah, Maryanto (2018) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan kompetensi aparatur pemerintah sebagai variabel moderasi, dapat ditarik kesimpulan:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Wonogiri. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Kejelasan sasaran anggaran dengan tambahan variabel moderasi kompetensi aparatur dengan hasil positif signifikan memperkuat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Wonogiri. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang baik dan didukung dengan kompetensi aparatur pemerintah yang tinggi maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang baik akan terwujud.

Rekomendasi

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan model intervening misalnya memunculkan variabel tata kelola pemerintah sebagai variabel intervening.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya dalam melakukan penelitian mengenai penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah perlu memperluas objek penelitian.
3. Peneliti selanjutnya dapat ikut terjun secara langsung dalam proses pengisian kuesioner agar responden mengerti dengan jelas dan bisa mengembalikan kuesioner seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Zachari, dan Maryanto. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Economac*. Vol. 2. No. 1, April, hlm 31 - 36. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Edisi Ketiga* Jakarta: Erlangga.
- Cefrida, Mentari. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. *JOM FEKON*. Vol. 1, No. 2, Oktober, hlm.

1 - 15. Universitas Riau, Pekanbaru

- Darman, B. Ardiyanti. 2015. The Effect of Budgetary Participation, Budget Goal Clarity, Decentralized Structure, and Public Accountability on the Performance of Regional Work Units (SKPD) at Gowa District, Sulawesi Selatan. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*. Volume III, Issue X, October, Page. 22 - 30. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna.
- Darwanis, dan S. Chairunnisa. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol. 6. No. 2, hlm. 150 - 174. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Fitrawati, A. Kahar, Muh. Ikbal. A. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Katalogis*. Vol. 5, No. 12, Desember, hlm 177 - 184. Universitas Tadulako.
- Fitriana, D. Riska, H. Nur, dan M.M.Cholid. 2018. Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. *E-JRA*. Vol. 7. No. 2, Agustus, hlm 91 - 103. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Freeman, Robert J. Dan Craig D. Shoulders, 2003. *Government and Nonprofit Accounting-Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Jensen, M. C and Meckling, W. H. 1976. *Theory Og The From Managerial Behaviour Agency Costs And Ownership Structure*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: penerbit ANDI.
- Nordiawan, Deddi, Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI). Nomor 18 Tahun 2016. Perangkat Daerah
- Peraturan Presiden (PERPRES). Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Putri, A. Rizka, A. Restu, P. Sem. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*. Vol. 4, No. 1, April, hlm. 2820 - 2834. Universitas Riau.
- Sugiyono . 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, Ehrmann, dan S. Mochammad. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23 - 26

Surat Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Kencana.

Ulum, Ihyaul. 2004. *Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press: Malang.

Widhantisa, Nuraya, dan Kadir. 2015. Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja, dan Kepatuhan pada Regulasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah di Kabupaten Tanah Laut). *JSAI*. Vol. 2, No. 1, Juni, hlm. 50 - 60. Universitas Lambung Mangkurat

<https://m.solopos.com/peringkat-ke-4-akuntabilitas-kinerja-pemkab-wonogiri-ungguli-solo-dan-semarang-973258>